

**KINERJA PENDIDIKAN BERDASARKAN INDEKS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNTUK SEMUA DAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM  
TAHUN 2011/2012**

**EDUCATION PERFORMANCE BASED ON EDUCATION FOR ALL DEVELOPMENT  
INDEX (EDI) AND MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)  
TAHUN 2011/2012**

**Ida Kintamani**  
**Pusat Data dan Statistik Pendidikan**  
**email: idakintamani@yahoo.com**

Diterima tanggal: 02/09/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 16/09/2013; Disetujui tanggal: 02/12/2013

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja pendidikan dengan menggunakan dua instrumen evaluasi, yaitu EDI dan MDGs serta persamaan dan perbedaan pencapaian kinerja menggunakan kedua instrumen tersebut. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif. Populasi studi ini adalah data semua provinsi pada tahun 2011/2012. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan instrumen EDI, capaian pendidikan di Indonesia mencapai 0,955, sedangkan penggunaan instrumen MDGs mencapai 0,944. Ada persamaan bahwa Indonesia termasuk peringkat ke-21 menggunakan instrumen keduanya. Provinsi terendah juga terjadi pada provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, perbedaan antarprovinsi pada EDI sebesar 0,195 lebih besar jika dibandingkan dengan MDGs sebesar 0,080. Selain itu, pencapaian provinsi terbaik bila menggunakan EDI adalah Provinsi Sulawesi Utara, namun ketika menggunakan MDGs adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua instrumen tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja pendidikan.

**Kata kunci:** Kinerja pendidikan, indikator pendidikan, indeks pengembangan pendidikan untuk semua, tujuan pembangunan milenium

**Abstract:** The purpose of this study is to provide an overview of educational attainment performance evaluation using two instruments, namely EDI and the MDGs as well as the similarities and differences in the achievement of performance using these instruments. The method used is a documentary study using descriptive analysis techniques. The population in this study is all province using 2011/2012 data. The study result were that by using the EDI instrument, Indonesia reached 0.955 while using the MDGs instrument reached 0.944. There are similarities that Indonesia is ranked on 21st using both instruments. As well as the lowest province also occurs in Papua and West Papua provinces. However, differences between provinces in the EDI of 0.195 greater than the MDGs by 0.080. In addition, the achievement of the best when using EDI province is reached the Province of North Sulawesi, but when using the MDGs is the Province of West Nusa Tenggara. Thus, it can be said that these instruments can be used to assess the performance of education.

**Keywords:** education performance, educational indicator, education for all development index, millenium development goals

## **Pendahuluan**

### **Latar belakang**

Dua jenis alat evaluasi pendidikan yang menjadi program bangsa-bangsa dan terus diupayakan keberlangsungannya adalah *Millenium Development Goals (MDGs)* dan *Education for All (EFA)*. Program bangsa-bangsa tersebut merupakan instrumen yang sangat memadai digunakan untuk pencapaian pendidikan internasional maupun pendidikan di Indonesia. Program pendidikan setiap tahun perlu dilakukan evaluasi untuk melihat kemajuan pendidikan. Dengan adanya evaluasi pendidikan setiap tahun, baik di tingkat nasional maupun khususnya pendidikan di setiap provinsi, kinerja pendidikan yang ada pada tahun tertentu dapat diketahui.

Agar evaluasi tersebut dapat tercapai, perlu adanya instrumen yang dapat digunakan untuk menentukan apakah kinerja pendidikan di tingkat nasional atau di setiap provinsi telah tercapai. Instrumen yang digunakan dapat terdiri atas berbagai indikator pendidikan yang selama ini digunakan. Instrumen yang cukup memadai digunakan untuk melihat pencapaian pendidikan adalah yang berasal dari internasional, yaitu *Education for All Development Index (EDI)* dan *MDGs*. Indikator-indikator yang digunakan dalam EDI merupakan ringkasan dari indikator yang digunakan dalam EFA. Demikian juga, *MDGs* yang sebagian juga mengenai pendidikan menggunakan indikator yang dapat menilai pendidikan. Kedua instrumen ini disebut memadai untuk melihat pencapaian pendidikan karena tidak hanya membandingkan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, namun juga dapat untuk membandingkan pendidikan di tingkat internasional.

Agar instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pendidikan di tingkat nasional maupun provinsi, bahkan kabupaten/kota, perlu dipahami indikator-indikator pendidikan yang digunakan pada EDI dan juga pada *MDGs*. Selain itu, agar dihasilkan evaluasi yang baik maka dalam menyusun indikator EDI dan *MDGs* hendaknya digunakan sumber data yang relevan sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan pendidikan yang ada berisi tentang 2

(dua) hal. Pertama, walaupun telah terdapat instrumen penilaian dari internasional tentang pendidikan melalui EDI dan *MDGs*, namun pelaksanaannya masih parsial, artinya tidak dilakukan secara terintegrasi antara EDI dan *MDGs* walaupun data dari kedua instrumen penilaian tersebut ada yang sama. Kedua, kedua instrumen penilaian tersebut karena digunakan secara terpisah sehingga tidak bisa diketahui apakah kinerja yang dihasilkan untuk EDI dengan *MDGs* akan sama bagi semua provinsi karena ada beberapa indikator yang sama.

Untuk menghindari tumpang tindih atau hasil indikator yang berbeda antara EDI dan *MDGs* perlu disusun kedua indikator tersebut dalam satu kegiatan sehingga dapat diketahui efektivitas masing-masing indikator yang ada.

### **Permasalahan**

Permasalahan dari kajian ini ada 3 (tiga), yaitu: 1) bagaimana pencapaian kinerja pendidikan tiap provinsi berdasarkan instrumen EDI? 2) bagaimana pencapaian kinerja pendidikan tiap provinsi berdasarkan instrumen *MDGs*? dan 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan pencapaian kinerja pendidikan tiap provinsi menggunakan kedua instrumen EDI dan *MDGs*?

### **Tujuan**

Tujuan penulisan ini ada 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah menyajikan tentang hasil indikator EDI dan *MDGs* dalam satu dokumen. Tujuan khususnya adalah menyajikan secara lebih rinci hasil pencapaian kinerja berdasarkan instrumen EDI dan *MDGs* dalam 3 (tiga) jenis, yaitu 1) pencapaian kinerja pendidikan berdasarkan EDI; 2) pencapaian kinerja pendidikan berdasarkan *MDGs*; dan 3) persamaan dan perbedaan pencapaian kinerja pendidikan antara EDI dan *MDGs*.

### **Kajian Pustaka**

#### ***Millenium Development Goals (MDGs)***

*MDGs* atau dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Milenium memiliki 2 (dua) sasaran. Pertama, *MDGs* memiliki 8 (delapan) tujuan yang diupayakan akan dicapai pada tahun 2015, yaitu tantangan-tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia. Tantangan-

tantangan dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara (termasuk Indonesia) dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan/negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. Kedua, *MDGs* telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalami kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut sehingga dibutuhkan kerja keras dari seluruh pihak.

Pencapaian *MDGs* di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerja sama dan implementasinya di masa depan, termasuk kampanye perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai *MDGs* di Asia dan Pasifik. Sasaran *MDGs* ada 8 (delapan) tujuan, yaitu: 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (DJPk-Kemkeu, 2011).

Dalam tulisan ini hanya ditekankan pada 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan: 2) pemerataan pendidikan dasar, dan tujuan 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, data yang digunakan hanyalah penduduk usia SD dan SMP, penduduk usia 15-24 tahun, dan data yang terkait dengan siswa SD dan SMP.

#### ***Education For All Development Index (EDI)***

Sebagai alat ukur tingkat keberhasilan pendidikan, EDI menggunakan empat dimensi dasar. Dimensi pertama, angka partisipasi SD yang diukur dari siswa SD dan SMP usia 7-12 tahun terhadap penduduk usia 7-12 tahun. Dimensi kedua, angka melek huruf dewasa (AMHD) yang diukur dari penduduk yang bisa membaca dan menulis huruf latin usia 15-59 tahun terhadap penduduk usia 15-59 tahun. Dimensi ketiga, indeks spesifik gender yang merupakan rata-rata

komposit indikator IPG APK SD, IPG APK SMP, dan IPG AMHD. Dimensi keempat, angka bertahan tingkat 5 SD yang diukur dari banyaknya siswa yang dapat bertahan sampai tingkat V SD (UNESCO, 2009).

Dalam studi ini hanya ditekankan pada EDI yang merupakan bagian dari EFA. Oleh karena itu, data yang digunakan hanyalah penduduk usia SD, usia SMP, penduduk usia 15-59 tahun, dan data siswa SD dan SMP.

#### **Indikator Pendidikan**

Indikator pendidikan dibahas karena digunakan dalam menilai capaian kinerja pendidikan, baik menggunakan EDI maupun *MDGs*. Indikator pendidikan mempunyai beberapa peran, yaitu mampu memantau efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pendidikan, mampu memutuskan aspek-aspek kunci dalam fungsi sistem pendidikan, dan alat penting untuk mengidentifikasi sistem pendidikan, dan ketika indikator disajikan secara reguler, indikator tersebut dapat memunculkan perubahan yang mungkin dalam menanggapi tindakan kebijakan (Ida Kintamani, 2009).

Studi ini dikhususkan pada indikator pendidikan yang digunakan untuk menilai pendidikan melalui tujuan pendidikan internasional, yaitu EDI dan *MDGs*.

#### **Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang digunakan adalah mempelajari dokumen yang ada untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu (Creswel, 2003). Data yang digunakan adalah data tahun 2011/2012, sedangkan yang dilakukan analisis adalah semua populasi atau jenjang pendidikan pada tingkat provinsi sesuai dengan keperluan EDI dan *MDGs*. Data SD yang dimaksud adalah SD dan MI, data SMP yang dimaksud adalah SMP dan MTs, sedangkan data SM yang dimaksud adalah SMA, SMK, dan MA.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan dilengkapi tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi (Gulo, 2002).

Berdasarkan pada indikator EDI dan *MDGs*, terdapat 3 (tiga) jenis indikator EDI yang ternyata juga digunakan dalam indikator *MDGs*, yaitu angka bertahan tingkat 5 SD (AB 5 SD), indeks paritas gender (IPG) angka partisipasi kasar (APK) SD, dan IPG APK SMP.

### Indikator EDI

Indikator EDI terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu 1) angka partisipasi murni usia 7-12 tahun (APM 7-12 tahun), 2) angka melek huruf dewasa usia 15-59 tahun (AMHD 15-59 tahun), 3) indeks spesifik gender (ISG), 4) angka bertahan tingkat 5 SD (AB 5 SD), dan 5) rangkuman EDI (UNESCO, 2009).

Untuk menghitung kelima indikator tersebut, perlu dipahami 10 jenis indikator pendidikan yang digunakan. Angka Partisipasi Murni 7-12 tahun (APM 7-12 tahun) adalah perbandingan antara siswa usia 7-12 tahun, baik yang berada di jenjang SD dan SMP dengan penduduk usia 7-12 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 3 (tiga) jenis, yaitu siswa jenjang SD usia 7-12 tahun, siswa jenjang SMP usia 12 tahun, dan penduduk usia 7-12 tahun. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik, idealnya = 100% berarti semua anak usia 7-12 tahun berada di sekolah, baik di jenjang SD maupun SMP. Dalam penulisan EDI, APM 7-12 tahun tidak dikalikan 100 karena dihitung sebagai indeks.

Angka melek huruf 15-59 tahun (AMH) adalah perbandingan antara penduduk melek huruf usia 15-59 tahun dengan penduduk usia 15-59 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 2 (dua) jenis, yaitu penduduk melek huruf usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin dan penduduk usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik, idealnya = 100% berarti semua penduduk usia 15 tahun ke atas semuanya dapat membaca dan menulis. Dalam penulisan EDI, seperti halnya APM 7-12 tahun, maka AMH 15 tahun ke atas juga tidak dikalikan 100 karena dihitung sebagai indeks.

Indeks paritas gender (IPG) adalah perbandingan antara APK atau AMH perempuan dengan APK atau AMH laki-laki. Data yang diperlukan ada 2 (dua) jenis, yaitu perhitungan APK atau AMH perempuan dan perhitungan APK atau AMH laki-

laki. Kriteria adalah makin mendekati 1 makin seimbang, idealnya = 1 berarti telah setara antara laki-laki dan perempuan, nilai 0,98 artinya sama dengan 1,02, yaitu mendekati seimbang, bedanya 0,98 berarti laki-laki lebih diuntungkan daripada perempuan, sedangkan 1,02 berarti perempuan lebih diuntungkan daripada laki-laki.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 2 (dua), yaitu siswa jenjang tertentu menurut jenis kelamin dan penduduk usia sekolah menurut jenis kelamin. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik, kemungkinan lebih besar daripada 100% karena lokasinya di kota atau daerah pinggiran kota. Dalam penulisan EDI seperti halnya APM7-12 tahun, APK SD maupun SMP tidak dikalikan 100 karena digunakan indeks.

Indeks spesifik gender (ISG) adalah penjumlahan antara 3 (tiga) jenis indikator IPG APK SD, IPG APK SMP, dan IPG AMH kemudian dibagi angka 3. Data yang diperlukan ada 3 (tiga), yaitu perhitungan IPG APK SD, perhitungan IPG APK SMP, dan perhitungan IPG AMH. Kriterianya adalah makin mendekati 1 makin baik, sebaliknya makin jauh dari 1 makin buruk, idealnya = 1 berarti sudah setara antara laki-laki dan perempuan.

Angka bertahan tingkat 5 SD (AB5 SD) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang dapat bertahan pada tingkat 5 SD dari suatu kohort sebesar 1000 pada jenjang SD dibandingkan dengan tahun-siswa jenjang SD dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 5 (lima), yaitu siswa jenjang SD menurut tingkat 2 tahun berurutan, mengulang jenjang SD menurut tingkat tahun terakhir, putus sekolah jenjang SD menurut tingkat tahun terakhir, lulusan jenjang SD tahun terakhir, dan program aplikasi efisiensi internal yang disusun oleh UNESCO dan telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik. Idealnya = 100% berarti semua dapat bertahan di sekolah sampai tingkat 5 SD. Seperti indikator lainnya, dalam penulisan EDI, AB5 SD tidak dikalikan 100 karena digunakan indeks.

*Education for all development index* (EDI) adalah penjumlahan antara 4 (empat) jenis indikator/komposit indikator APM 7-12 tahun, AMH, ISG, dan AB 5 SD kemudian dibagi 4. Data yang

diperlukan ada 4 (empat), yaitu: 1) perhitungan APM 7-12 tahun, 2) perhitungan AMH, 3) perhitungan ISG, dan 4) perhitungan AB 5 SD. Kriterianya adalah makin mendekati 1 makin baik, sebaliknya makin jauh dari 1 makin buruk, di mana nilai 1 adalah ideal.

### **Indikator MDGs**

Indikator MDGs terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu 1) angka partisipasi murni (APM) SD dan SMP; 2) angka bertahan tingkat 5 (AB5) SD dan AB SMP; 3) angka melek huruf pemuda usia 15-24 tahun (AMHP); 4) angka lulusan (AL) SD dan SMP; 5) angka putus sekolah (APS) SD dan SMP; 6) angka melanjutkan (AM) SMP dan SM; 7) IPG APK SD dan IPG APK SMP; 8) IPG AMHP, dan 9) nilai MDGs. Untuk menghitung kesembilan indikator tersebut, perlu dipahami 15 jenis indikator pendidikan yang digunakan (tiga jenis indikator sama dengan indikator EDI sehingga tidak dijelaskan). APM adalah perbandingan antara siswa usia tertentu sesuai jenjang sekolah dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 2 (dua) jenis, yaitu siswa jenjang tertentu usia sekolah dan penduduk usia sekolah jenjang tertentu. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik, idealnya = 100% berarti semua anak usia sekolah berada di jenjang yang sesuai.

Angka bertahan SMP (AB SMP) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang dapat bertahan sampai lulus SMP dari suatu kohort sebesar 1000 pada suatu pendidikan tertentu dibandingkan dengan tahun-siswa dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 5 (lima) jenis, yaitu: 1) siswa jenjang SMP menurut tingkat dua tahun berurutan, 2) mengulang jenjang SMP menurut tingkat tahun terakhir, 3) putus sekolah jenjang SMP menurut tingkat tahun terakhir, 4) lulusan jenjang SMP tahun terakhir, 5) dan program aplikasi efisiensi internal yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik. Idealnya = 100% berarti semua siswa dapat bertahan di sekolah sampai lulus.

AMHP 15-24 tahun adalah perbandingan antara penduduk melek huruf pemuda usia 15-24 tahun dengan penduduk usia 15-24 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Data yang

diperlukan ada 2 (dua) jenis, yaitu penduduk melek huruf usia 15-24 tahun menurut jenis kelamin dan penduduk usia 15-24 tahun menurut jenis kelamin. Bila diketahui hanya penduduk yang buta huruf, maka penduduk melek huruf adalah kebalikannya. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik, idealnya = 100%, berarti penduduk usia 15-24 tahun semuanya dapat membaca dan menulis.

Angka lulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang tertentu dengan siswa tingkat tertinggi jenjang yang sesuai tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 2 (dua), yaitu lulusan jenjang tertentu dan siswa tingkat tertinggi jenjang yang sesuai tahun ajaran sebelumnya. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik, makin jauh dari 100% makin buruk, idealnya=100% berarti siswa tingkat tertinggi jenjang yang sama semuanya lulus.

Angka putus sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah jenjang tertentu dengan siswa jenjang yang sesuai tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada 2 (dua), yaitu putus sekolah jenjang tertentu dan siswa jenjang tertentu tahun ajaran sebelumnya.

Kriterianya adalah makin mendekati 0% makin baik, makin jauh dari 0% makin buruk, idealnya = 0% berarti tidak ada siswa jenjang SD yang putus sekolah.

Angka melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru jenjang tertentu dengan lulusan jenjang yang lebih rendah tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Data yang diperlukan ada dua, yaitu siswa baru jenjang tertentu dan lulusan jenjang yang lebih rendah tahun ajaran sebelumnya. Kriterianya adalah makin mendekati 100% makin baik, makin jauh dari 100% makin buruk, idealnya adalah 100%.

*Millenium Development Goals (MDGs)* adalah penjumlahan antara 8 (delapan) jenis indikator/komposit indikator APM SD, APM SMP, AB5 SD, AB SMP, AMHP, AL SD, AL SMP, APS SD, APS SMP, AM SMP, AM SM, IPG APK SD, IPG APK SMP, dan IPG AMHP kemudian dibagi 14. Data yang diperlukan ada 8 (delapan) jenis, yaitu perhitungan APM SD dan SMP, perhitungan AB 5 SD dan AB SMP,

perhitungan AMHP usia 15-24 tahun, perhitungan AL SD dan SMP, perhitungan APS SD dan SMP, perhitungan AM SMP dan AM SM, perhitungan IPG APK SD dan IPG APK SMP, dan perhitungan IPG AMHP. Kriterianya adalah makin mendekati 1 makin baik, sebaliknya makin jauh dari 1 makin buruk, nilai 1 adalah ideal.

### Sumber Data

Untuk menghitung indikator EDI dan MDGs dan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah 3 (tiga) besaran pokok, yaitu dokumentasi yang telah ada di Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) berupa statistik pendidikan yang tiap tahun dihasilkan, statistik madrasah yang dihasilkan oleh Kemenag, dan penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan untuk menyusun penduduk tahun 2011 dan merupakan proyeksi yang disusun oleh PDSP dengan menggunakan indeks perbedaan data hasil sensus 2010 dengan proyeksi penduduk tahun 2010 yang proyeksinya disusun oleh PDSP (Badan Pusat Statistik, 2011; Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012d). Sesuai dengan data statistik yang tersedia pada PDSP dan Kemenag, data yang digunakan dalam analisis ini adalah data SD termasuk MI, SMP termasuk MTs, dan SM termasuk MA tahun 2011/2012 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012a, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012b, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012c, Kementerian Agama, 2012).

Data yang diperlukan untuk menyusun indikator EDI dan MDGs ada perbedaan. Untuk indikator EDI, data yang diperlukan ada 4 (empat) jenis, yaitu data penduduk usia sekolah usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun serta usia 15-59 tahun, data siswa SD, MI, SMP, dan MTs menurut jenis kelamin dan usia 7-12 tahun, data penduduk buta huruf usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin, dan data siswa SD menurut tingkat dua tahun berurutan, mengulang menurut tingkat, putus sekolah menurut tingkat, dan lulusan untuk menghitung angka bertahan 5 SD. Selain itu, digunakan program aplikasi efisiensi internal pendidikan.

Untuk indikator MDGS, data yang diperlukan ada 9 (sembilan) jenis, yaitu: 1) data penduduk

usia sekolah usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 15-24 tahun; 2) data siswa SD, MI, SMP, dan MTs menurut jenis kelamin dan usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun; 3) data lulusan SD+MI dan SMP+MTs; 4) data siswa tingkat VI SD+MI dan siswa tingkat IX SMP+MTs tahun sebelumnya; 5) data putus SD+MI, SMP+MTs; 6) data siswa SD+MI dan siswa SMP+MTs tahun sebelumnya; 7) data siswa baru SMP+MTs dan SM+MA; 8) data penduduk buta huruf usia 15-24 tahun menurut jenis kelamin, dan 9) data SD dan SMP menurut tingkat dua tahun berurutan, mengulang menurut tingkat, putus sekolah menurut tingkat, dan 9) lulusan untuk menghitung angka bertahan SMP. Selain itu, digunakan program aplikasi efisiensi internal pendidikan.

### Hasil dan Bahasan

Hasil dan bahasan yang disajikan meliputi indikator EDI dan MDGs dengan diberikan analisis secara deskriptif. Kedua indikator tersebut dianalisis untuk mengetahui disparitas antar-provinsi. Selain itu, untuk mengetahui kinerja pendidikan menggunakan 2 (dua) instrumen yaitu: EDI dan MDGs apakah menghasilkan kinerja pendidikan yang sama atau berbeda. Bila hasilnya sama berarti EDI dan MDGs sebagai alat evaluasi sudah sesuai. Bila hasilnya berbeda, maka bisa digunakan salah satu untuk evaluasi kinerja pendidikan.

Agar dapat dihasilkan indikator EDI dan MDGs, maka telah disusun program aplikasi untuk menghitung EDI dan MDGs, sehingga dengan mengisi data penduduk dan data pendidikan maka secara langsung dapat dihitung indikator EDI maupun MDGs dan pada akhirnya kinerja pendidikan berdasarkan EDI dan MDGs.

### Kinerja Pendidikan Berdasarkan EDI

Seperti yang dijelaskan pada metodologi, untuk menyusun indikator EDI digunakan data tahun 2011/2012 sebagai data terbaru yang tersedia pada saat ini. Analisis yang digunakan adalah pada tingkat provinsi. Sesuai dengan program aplikasi yang telah disusun, dibahas tentang data penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 15-59 tahun, data tingkat siswa SD dan SMP menurut usia sekolah dan jenis kelamin serta penduduk buta huruf usia 15-59 tahun. Berdasarkan ketiga

jenis data tersebut, dapat dihitung indikator EDI yang terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu: 1) APM 7-12 tahun dan AMH 15-59 tahun; 2) indeks segregasi gender; 3) angka bertahan tingkat 5 SD, dan 4) kinerja pendidikan yang dijabarkan dari keempat indikator.

Dengan menggunakan rumus yang terdapat pada metodologi dan berdasarkan data yang dijelaskan sebelumnya, dapat dihitung 4 (empat) jenis indikator EDI.

Tabel 1 menunjukkan 4 (empat) jenis indikator EDI, yaitu indikator 1 adalah APM7-12 tahun, indikator 2 adalah AMH usia 15-59 tahun, indikator 3 adalah ISG, dan indikator 4 adalah AB5 SD yang berasal dari 8 (delapan) indikator pendidikan seperti APM 7-12 tahun, APK SD, APK SMP, dan AMH usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin, IPG APK SD, IPG APK SMP, IPG AMH, dan AB 5 SD. APM 7-12 tahun secara nasional sebesar 92,32; namun angka terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 98,79 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 69,85. Angka provinsi yang lebih kecil dari angka nasional terjadi di 11 provinsi, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan disparitas yang sangat tinggi antarprovinsi dengan perbedaan tertinggi dan terendah sebesar 29%.

Masih pada Tabel 1, bila dilihat APK tingkat SD, maka secara nasional sebesar 108,37% dan terbesar terjadi di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 125,68% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua, yaitu sebesar 83,11%. Bila dirinci menurut jenis kelamin, maka APK SD laki-laki sebesar 108,38% sedikit lebih besar daripada APK SD perempuan, yaitu sebesar 108,37%. APK SD laki-laki terbesar juga di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 123,82% dan terkecil juga di Papua, yaitu sebesar 83,86%. APK SD perempuan terbesar di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 128,48% dan terkecil juga di Papua, yaitu sebesar 82,24%. Kondisi ini juga menunjukkan disparitas APK SD yang sangat besar antarprovinsi dengan perbedaan tertinggi dan terendah sebesar 43%.

APK SMP pada Tabel 1 menunjukkan bahwa secara nasional sebesar 88,87% dan terbesar terjadi di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 112,75% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua, yaitu sebesar

64,19%. Bila dirinci menurut jenis kelamin, APK SMP perempuan sebesar 90,16% lebih besar daripada APK SMP laki-laki, yaitu sebesar 87,64%. APK SMP laki-laki terbesar di Provinsi Maluku Utara sebesar 111,48% dan terkecil juga di Papua sebesar 62,54%. Demikian juga APK SMP perempuan terbesar juga di Provinsi Maluku Utara sebesar 112,75% dan terkecil juga di Papua sebesar 66,11%. Kondisi ini juga menunjukkan disparitas APK SMP yang sangat besar antarprovinsi dengan perbedaan tertinggi dan terendah sebesar 48%.

AMH secara nasional sebesar 95,54% menunjukkan kondisi yang baik, karena telah mendekati 100%. Bila dilihat tiap provinsi, maka AMH terbaik adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 99,11% dan terkecil adalah Provinsi Papua sebesar 58,69%. Kondisi ini menunjukkan disparitas yang besar karena perbedaan yang tertinggi dan terendah mencapai sekitar 40%. Bila dirinci menurut jenis kelamin, maka AMH Laki-laki sebesar 97,02% lebih besar daripada AMH perempuan sebesar 94,04% dengan perbedaan sekitar 3%. AMH laki-laki terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,57% dan terkecil juga di Provinsi Papua sebesar 65,86%, perbedaan cukup besar sekitar 34%. AMH perempuan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 99,10% dan terkecil juga di Provinsi Papua sebesar 51,10%, perbedaan sangat besar sekitar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa AMH perempuan ternyata dalam kondisi kurang baik karena disparitasnya sangat besar jika dibandingkan dengan AMH laki-laki.

IPG APK SD, APK SMP, dan IPG AMH yang dihitung dalam EDI dikonversi menjadi angka kurang dari 1.00. Dengan demikian, bila nilainya lebih dari satu, maka pembagiannya dibalik yang lebih besar sehingga dihasilkan nilai yang kurang dari 1 dengan standar idealnya adalah 1. IPG APK SD secara nasional sebesar 1,00 artinya kondisinya ideal, karena seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kondisi ideal terjadi di 9 (sembilan) provinsi, yaitu: 1) Sumatera Utara, 2) Bali, 3) Lampung, 4) Nusa Tenggara Barat, 5) Kalimantan Barat, 6) Nusa Tenggara Timur, 7) Kalimantan Timur, 8) Jambi, dan 9) Sulawesi Selatan. Terdapat 13 provinsi lainnya yang telah mendekati seimbang sebesar 0,99, sedangkan provinsi yang paling tidak seimbang adalah Papua Barat sebesar 0,86.

Tabel 1. Indikator Pendidikan yang Dihasilkan dari EDI Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	APM 7-12 th (Indikator 1)	APK SD			APK SMP		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	DKI Jakarta	91,77	103,25	103,85	103,54	97,69	93,54	95,59
2	Jawa Barat	88,22	103,44	104,55	103,98	84,53	87,87	86,16
3	Banten	93,28	107,05	108,60	107,80	81,72	83,97	82,81
4	Jawa Tengah	94,41	109,83	108,23	109,05	87,57	89,94	88,72
5	DI Yogyakarta	91,79	105,12	104,10	104,62	93,59	94,48	94,02
6	Jawa Timur	89,84	105,27	102,51	103,92	83,10	83,82	83,45
7	Aceh	96,12	117,83	117,19	117,52	98,35	101,30	99,79
8	Sumatera Utara	95,56	110,24	110,30	110,27	94,69	96,50	95,58
9	Sumatera Barat	96,72	114,78	112,19	113,53	86,59	95,70	91,04
10	Riau	90,35	106,35	105,20	105,80	84,29	88,13	86,16
11	Kepulauan Riau	83,53	100,50	103,11	101,77	91,69	97,78	94,64
12	Jambi	94,62	116,87	117,37	117,11	90,02	94,32	92,12
13	Sumatera Selatan	98,01	113,59	115,67	114,60	87,03	88,45	87,73
14	Bangka Belitung	92,40	107,87	108,92	108,38	79,81	87,50	83,54
15	Bengkulu	97,56	119,46	120,84	120,13	93,61	95,83	94,69
16	Lampung	94,92	119,61	119,48	119,54	87,19	91,26	89,17
17	Kalimantan Barat	98,11	119,36	119,21	119,29	85,40	86,40	85,89
18	Kalimantan Tengah	93,85	118,54	120,10	119,30	87,69	90,57	89,10
19	Kalimantan Selatan	91,38	107,26	106,34	106,82	73,52	75,15	74,31
20	Kalimantan Timur	92,83	107,83	107,44	107,64	92,33	95,46	93,84
21	Sulawesi Utara	96,36	110,53	111,51	111,00	93,92	99,67	96,72
22	Gorontalo	95,42	117,94	120,63	119,25	84,24	87,89	86,02
23	Sulawesi Tengah	93,69	106,19	107,10	106,63	96,39	100,00	98,15
24	Sulawesi Selatan	91,16	105,09	105,58	105,33	94,14	96,76	95,42
25	Sulawesi Barat	96,69	111,18	114,97	113,01	93,33	96,34	94,79
26	Sulawesi Tenggara	98,74	115,67	117,62	116,61	98,62	102,16	100,33
27	Maluku	98,79	123,82	127,69	125,68	107,47	112,24	109,78
28	Maluku Utara	95,19	114,86	128,48	121,43	111,48	112,75	112,10
29	Bali	91,07	105,21	105,32	105,26	96,27	98,55	97,37
30	NTB	98,35	113,47	113,33	113,40	99,47	100,78	100,11
31	NTT	98,55	118,28	118,60	118,43	90,34	92,91	91,60
32	Papua	69,85	83,86	82,24	83,11	62,54	66,11	64,19
33	Papua Barat	80,20	87,41	101,99	94,04	68,27	81,92	74,31
	Jumlah	92,32	108,38	108,37	108,37	87,64	90,16	88,87

Dengan demikian, dapat dikatakan IPG APK SD belum setara karena hanya tercapai 9 provinsi.

IPG APK SMP secara nasional sebesar 0,97, artinya kondisinya baik karena mendekati angka 1 walau belum seimbang antara perempuan dan laki-laki. Ternyata belum ada satu provinsi pun dalam kondisi setara antara perempuan dengan

laki-laki yang memiliki angka 1. Terdapat 5 (lima) provinsi yang mendekati seimbang dengan nilai 0,99, yaitu: 1) Provinsi Jawa Timur, 2) DI Yogyakarta, 3) Maluku Utara, 4) Kalimantan Barat, dan 5) Nusa Tenggara Barat, sedangkan provinsi yang paling tidak seimbang adalah Papua Barat sebesar 0,83. Dengan demikian, dapat dikatakan IPG APK

Tabel 1 (lanjutan)  
Indikator Pendidikan yang Dihasilkan dari EDI Tahun 2011/2012

Nama Provinsi	AMH (Indikator 2)			IPG			ISG	AB V SD
	L	P	L+P	APK SD	APK SMP	AMH	(Ind 3)	(Ind 4)
DKI Jakarta	99,57	98,54	99,06	0,99	0,96	0,99	0,98	97,02
Jawa Barat	98,57	96,62	97,62	0,99	0,96	0,98	0,98	97,04
Banten	98,71	96,37	97,57	0,99	0,97	0,98	0,98	96,25
Jawa Tengah	97,07	93,34	95,19	0,99	0,97	0,96	0,97	96,48
DI Yogyakarta	98,42	96,11	97,26	0,99	0,99	0,98	0,99	97,09
Jawa Timur	95,79	91,26	93,51	0,97	0,99	0,95	0,97	96,56
Aceh	98,32	96,28	97,30	0,99	0,97	0,98	0,98	96,59
Sumatera Utara	98,47	97,04	97,76	1,00	0,98	0,99	0,99	96,58
Sumatera Barat	98,17	96,92	97,54	0,98	0,90	0,99	0,96	95,62
Riau	98,89	97,54	98,24	0,99	0,96	0,99	0,98	96,40
Kepulauan Riau	98,62	97,53	98,09	0,97	0,94	0,99	0,97	97,73
Jambi	98,23	95,58	96,93	1,00	0,95	0,97	0,97	95,04
Sumatera Selatan	98,55	97,07	97,82	0,98	0,98	0,99	0,98	95,65
Bangka Belitung	97,90	95,14	96,59	0,99	0,91	0,97	0,96	92,21
Bengkulu	98,30	95,98	97,17	0,99	0,98	0,98	0,98	95,26
Lampung	98,58	96,50	97,58	1,00	0,96	0,98	0,98	96,96
Kalimantan Barat	96,13	89,35	92,82	1,00	0,99	0,93	0,97	91,28
Kalimantan Tengah	98,78	96,65	97,77	0,99	0,97	0,98	0,98	95,31
Kalimantan Selatan	98,22	96,06	97,16	0,99	0,98	0,98	0,98	95,38
Kalimantan Timur	98,61	97,06	97,88	1,00	0,97	0,98	0,98	96,25
Sulawesi Utara	99,12	99,10	99,11	0,99	0,94	1,00	0,98	97,28
Gorontalo	94,77	96,07	95,42	0,98	0,96	0,99	0,97	94,22
Sulawesi Tengah	96,61	94,67	95,67	0,99	0,96	0,98	0,98	94,53
Sulawesi Selatan	92,39	91,10	91,72	1,00	0,97	0,99	0,98	94,72
Sulawesi Barat	92,69	87,68	90,18	0,97	0,97	0,95	0,96	93,11
Sulawesi Tenggara	96,27	92,29	94,27	0,98	0,97	0,96	0,97	93,76
Maluku	97,84	96,78	97,31	0,97	0,96	0,99	0,97	96,96
Maluku Utara	98,17	96,43	97,32	0,89	0,99	0,98	0,96	94,11
Bali	96,79	90,33	93,59	1,00	0,98	0,93	0,97	96,84
NTB	91,93	84,44	87,98	1,00	0,99	0,92	0,97	96,47
NTT	92,41	90,30	91,33	1,00	0,97	0,98	0,98	92,83
Papua	65,86	51,10	58,69	0,98	0,95	0,78	0,90	93,78
Papua Barat	97,02	91,79	94,75	0,86	0,83	0,95	0,88	91,94
Jumlah	97,02	94,04	95,54	1,00	0,97	0,97	0,98	96,13

SMP belum setara karena tak ada provinsi yang mencapai ideal.

IPG AMH secara nasional sebesar 0,97 artinya belum seimbang antara laki-laki dan perempuan. Provinsi Sulawesi Utara yang terbaik karena sudah setara antara laki-laki dan perempuan. Terdapat

9 (sembilan) provinsi yang memiliki kondisi mendekati seimbang dengan nilai 0,99, yaitu: 1) Provinsi DKI Jakarta, 2) Maluku, 3) Kepulauan Riau, 4) Sumatera Barat, 5) Gorontalo, 6) Riau, 7) Sulawesi Selatan, 8) Sumatera Utara, dan 9) Sumatera Selatan, sedangkan provinsi yang paling tidak

seimbang adalah Papua sebesar 0,78. Dengan demikian, dapat dikatakan IPG AMH belum setara karena hanya 1 provinsi yang mencapai ideal.

Berdasarkan ketiga IPG APK SD, IPG APK SMP, dan IPG AMH, sehingga dapat dihitung ISG. Secara nasional ISG sebesar 0,98 dengan angka terbesar mendekati seimbang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dan Sumatera Utara sebesar 0,99 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar

0,88. ISG ini juga menunjukkan tidak adanya kesetaraan gender antarprovinsi.

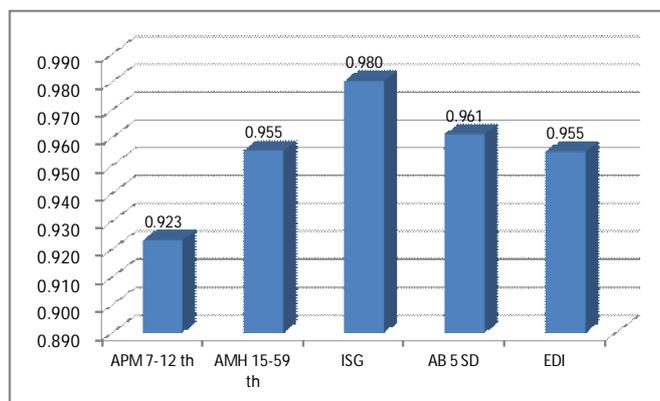
Berdasarkan AB 5 SD secara nasional sebesar 96,13 dengan angka terbesar sebesar 97,73 terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 91,28. Kondisi AB 5 SD juga menunjukkan masih adanya disparitas antarprovinsi dengan perbedaan sebesar 6%.

Tabel 2. Nilai EDI Berdasarkan 4 Indikator Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	APM 7-12 th (Indikator 1)	AMH 15-59 th (Indikator 2)	ISG (Indikator 3)	AB 5 SD (Indikator 4)	EDI
1	DKI Jakarta	0,92	0,99	0,98	0,97	0,965
2	Jawa Barat	0,88	0,98	0,98	0,97	0,951
3	Banten	0,93	0,98	0,98	0,96	0,962
4	Jawa Tengah	0,94	0,95	0,97	0,96	0,959
5	DI Yogyakarta	0,92	0,97	0,99	0,97	0,962
6	Jawa Timur	0,90	0,94	0,97	0,97	0,943
7	Aceh	0,96	0,97	0,98	0,97	0,970
8	Sumatera Utara	0,96	0,98	0,99	0,97	0,972
9	Sumatera Barat	0,97	0,98	0,96	0,96	0,964
10	Riau	0,90	0,98	0,98	0,96	0,957
11	Kepulauan Riau	0,84	0,98	0,97	0,98	0,940
12	Jambi	0,95	0,97	0,97	0,95	0,960
13	Sumatera Selatan	0,98	0,98	0,98	0,96	0,975
14	Bangka Belitung	0,92	0,97	0,96	0,92	0,943
15	Bengkulu	0,98	0,97	0,98	0,95	0,970
16	Lampung	0,95	0,98	0,98	0,97	0,968
17	Kalimantan Barat	0,98	0,93	0,97	0,91	0,949
18	Kalimantan Tengah	0,94	0,98	0,98	0,95	0,962
19	Kalimantan Selatan	0,91	0,97	0,98	0,95	0,955
20	Kalimantan Timur	0,93	0,98	0,98	0,96	0,963
21	Sulawesi Utara	0,96	0,99	0,98	0,97	0,976
22	Gorontalo	0,95	0,95	0,97	0,94	0,956
23	Sulawesi Tengah	0,94	0,96	0,98	0,95	0,954
24	Sulawesi Selatan	0,91	0,92	0,98	0,95	0,940
25	Sulawesi Barat	0,97	0,90	0,96	0,93	0,940
26	Sulawesi Tenggara	0,99	0,94	0,97	0,94	0,959
27	Maluku	0,99	0,97	0,97	0,97	0,976
28	Maluku Utara	0,95	0,97	0,96	0,94	0,955
29	Bali	0,91	0,94	0,97	0,97	0,946
30	NTB	0,98	0,88	0,97	0,96	0,949
31	NTT	0,99	0,91	0,98	0,93	0,952
32	Papua	0,70	0,59	0,90	0,94	0,781
33	Papua Barat	0,80	0,95	0,88	0,92	0,887
	Indonesia	0,92	0,96	0,98	0,96	0,955

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai EDI tiap provinsi dari setiap indikator. APM 7-12 tahun sebesar 0,92, AMH 15-59 tahun sebesar 0,96, ISG sebesar 0,98 dan AB 5 SD sebesar 0,96. Dengan menggunakan komposit 4 (empat) jenis indikator, dapat dihitung pencapaian pendidikan melalui EDI. Nilai EDI sebesar 0,955, artinya sudah baik, karena telah mendekati angka 1 sebagai hasil yang terbaik. EDI terbaik terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku sebesar 0,976 dan terburuk terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,781 sehingga berbeda sebesar sekitar 0,20. Kondisi ini juga menunjukkan disparitas yang sangat besar antarprovinsi dalam pencapaian kinerja pendidikan berdasarkan instrumen EDI.

Rincian indikator EDI makin jelas terlihat pada Grafik 1, ISG menduduki nilai tertinggi sebesar 0,980 sehingga dapat dikatakan sudah ada kesetaraan gender, sedangkan terkecil adalah APM 7-12 tahun sebesar 0,923 karena makin jauh dari nilai 1. Oleh karena itu, untuk meningkatkan EDI, diperlukan perbaikan pada APM 7-12 tahun, kemudian AMH 15-59 tahun agar EDI secara nasional meningkat.



Grafik 1. Nilai EDI Berdasarkan Indikator Pendidikan Tahun 2011/2012

Tabel 3 dan Grafik 2 menunjukkan peringkat EDI tiap provinsi. Bila dilihat dari peringkatnya maka peringkat pertama adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku sebesar 0,976. Terdapat 20 provinsi yang memiliki nilai lebih baik daripada nasional dan yang lebih buruk daripada nasional terdapat pada 13 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua. Agar EDI

meningkat, oleh karenanya ke-13 provinsi yang lebih rendah dari nasional hendaknya meningkatkan semua indikator EDI. Contohnya, Provinsi Papua harus meningkatkan APM 7-12 tahun dengan cara memasukkan penduduk usia 7-12 tahun ke sekolah, AMH harus ditingkatkan melalui pendidikan keaksaraan, ISG perlu ditingkatkan dengan mengajak perempuan untuk bersekolah di SD, SMP, atau pendidikan keaksaraan. AB 5 SD harus ditingkatkan dengan mengurangi siswa putus sekolah melalui program *retrieval* atau mengulang melalui program *remedial*.

### Kinerja Pendidikan Berdasarkan MDGs

Seperti yang dijelaskan pada metodologi, bahwa untuk menyusun indikator MDGs juga digunakan data tahun 2011/2012 sebagai data terbaru yang tersedia pada saat ini. Analisis yang digunakan adalah pada tingkat provinsi. Sesuai dengan program aplikasi MDGs yang telah disusun, perlu dibahas tentang data penduduk usia 15-24 tahun, lulusan tingkat SD dan SMP, siswa tingkat tertinggi SD dan SMP, putus sekolah tingkat SD dan SMP,

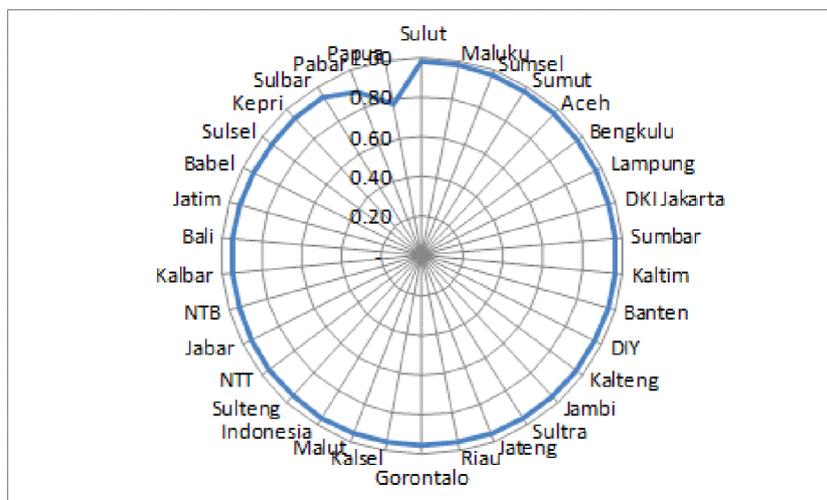
siswa tingkat SD dan SMP tahun sebelumnya, putus sekolah tingkat SD dan SMP, siswa baru tingkat SMP dan SM serta penduduk buta huruf usia 15-24 tahun.

Dengan menggunakan rumus yang terdapat dalam metodologi dan berdasarkan pada data yang dijelaskan sebelumnya, dapat dihitung 8 (delapan) jenis indikator MDGs.

Tabel 4 menunjukkan 8 (delapan) jenis indikator untuk menghitung MDGs yang berasal dari 22 jenis indikator, yaitu: 1) APM SD dan APM

Tabel 3. Peringkat Berdasarkan Nilai EDI Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	EDI	No.	Provinsi	EDI
1	Sulawesi Utara	0,976	18	Gorontalo	0,956
2	Maluku	0,976	19	Kalimantan Selatan	0,955
3	Sumatera Selatan	0,975	20	Maluku Utara	0,955
4	Sumatera Utara	0,972	21	<b>Indonesia</b>	0,955
5	Aceh	0,970	22	Sulawesi Tengah	0,954
6	Bengkulu	0,970	23	NTT	0,952
7	Lampung	0,968	24	Jawa Barat	0,951
8	DKI Jakarta	0,965	25	NTB	0,949
9	Sumatera Barat	0,964	26	Kalimantan Barat	0,949
10	Kalimantan Timur	0,963	27	Bali	0,946
11	Banten	0,962	28	Jawa Timur	0,943
12	DI Yogyakarta	0,962	29	Bangka Belitung	0,943
13	Kalimantan Tengah	0,962	30	Sulawesi Selatan	0,940
14	Jambi	0,960	31	Kepulauan Riau	0,940
15	Sulawesi Tenggara	0,959	32	Sulawesi Barat	0,940
16	Jateng	0,959	33	Papua Barat	0,887
17	Riau	0,957	34	Papua	0,781



Grafik 2. Peringkat EDI tiap Provinsi Tahun 2011/2012

SMP; 2) AB 5 SD dan AB SMP; 3) AL SD dan AL SMP; 4) APS SD dan APS SMP; 5) AM SMP dan AM SM; 6) APK SD Laki-laki, APK SD Perempuan, dan APK SD, APK SMP Laki-laki, APK SMP Perempuan, dan APK SMP; 7) IPG APK SD dan IPG APK SMP; 8) AMHP Laki-laki, AMHP Perempuan dan AMHP serta IPG AMHP.

Indikator 1 adalah APM SD dan APM SMP. Secara nasional APM SD sebesar 89,32% dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 96,93 dan terkecil terjadi di Provinsi

Papua sebesar 68,03%. Perbedaan APM SD antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 28,90% menunjukkan disparitas yang tinggi. Demikian juga, APM SMP nasional sebesar 71,97% dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 98,25% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 52,98%. Perbedaan APM SMP antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 45,27% menunjukkan disparitas yang tinggi.

Indikator 2 adalah AB 5 SD dan AB SMP tiap provinsi. AB 5 SD nasional sebesar 96,13%

dengan nilai terbesar terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 97,73% dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 91,28%. Perbedaan AB 5 SD antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 6,45% menunjukkan adanya disparitas. AB SMP nasional sebesar 97,00%

dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 99,34% dan terkecil terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 90,75%. Perbedaan AB SMP antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 8,59% menunjukkan adanya disparitas.

Tabel 4. Indikator Pendidikan yang Dihasilkan dari MDGs Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	APM		Angka Bertahan		Angka Lulusan		Angka Putus Sek		Angka Melanjutkan	
		SD	SMP	5 SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SMP	SM
1	DKI Jakarta	87,10	69,71	97,02	97,15	98,85	98,68	0,69	0,45	99,92	98,44
2	Jawa Barat	85,32	72,49	97,04	98,69	99,84	95,69	0,69	1,61	92,62	80,54
3	Banten	90,68	66,02	96,25	96,22	98,58	98,02	0,80	0,96	89,34	77,51
4	Jawa Tengah	91,36	68,65	96,48	96,93	99,51	93,31	0,72	0,46	95,13	75,61
5	DI Yogyakarta	87,99	71,79	97,09	95,51	97,30	94,34	0,68	0,20	109,88	105,08
6	Jawa Timur	87,11	67,38	96,56	97,75	99,60	95,35	0,68	0,79	83,99	80,65
7	Aceh	93,61	77,86	96,59	94,51	99,44	96,07	0,68	2,70	99,42	94,31
8	Sumatera Utara	92,05	74,56	96,58	95,06	99,29	97,76	0,79	1,63	98,12	92,96
9	Sumatera Barat	93,83	67,79	95,62	90,75	99,52	92,42	0,89	0,88	99,26	95,17
10	Riau	87,39	72,58	96,40	99,14	98,69	96,59	0,84	2,04	96,26	91,28
11	Kepulauan Riau	81,80	64,09	97,73	96,74	99,48	96,55	0,46	3,38	98,28	90,56
12	Jambi	91,20	74,94	95,04	96,56	99,57	98,20	1,10	2,57	93,78	89,36
13	Sumatera Selatan	94,48	73,19	95,65	98,04	99,55	99,78	0,97	1,33	94,80	84,81
14	Bangka Belitung	89,21	67,28	92,21	97,03	98,38	95,21	1,30	3,10	99,82	96,00
15	Bengkulu	94,82	76,58	95,26	97,71	98,37	97,87	1,04	1,62	90,19	89,77
16	Lampung	91,59	71,67	96,96	96,08	99,10	98,03	0,70	2,39	86,34	71,91
17	Kalimantan Barat	95,65	69,46	91,28	94,51	98,62	98,00	1,57	4,74	86,58	79,91
18	Kalimantan Tengah	91,10	72,79	95,31	94,52	99,09	95,74	0,99	1,92	87,94	85,31
19	Kalimantan Selatan	88,94	57,45	95,38	93,29	96,70	98,61	0,83	2,17	80,72	77,32
20	Kalimantan Timur	89,22	78,87	96,25	95,67	99,27	97,05	0,80	1,17	99,94	99,14
21	Sulawesi Utara	91,55	71,61	97,28	93,90	98,51	99,67	0,63	2,15	99,78	94,66
22	Gorontalo	93,04	69,10	94,22	97,22	97,62	99,34	1,02	3,36	98,42	94,91
23	Sulawesi Tengah	90,87	86,49	94,53	97,79	99,35	92,53	1,08	3,47	88,65	99,15
24	Sulawesi Selatan	87,90	82,60	94,72	99,34	99,13	98,81	1,17	0,95	94,15	99,26
25	Sulawesi Barat	94,49	84,03	93,11	98,69	96,28	99,56	1,50	0,90	96,80	94,60
26	Sulawesi Tenggara	95,76	82,34	93,76	95,33	99,26	97,38	1,37	0,61	91,25	96,32
27	Maluku	95,44	87,62	96,96	97,37	98,11	99,18	0,71	2,85	87,17	91,08
28	Maluku Utara	92,62	98,25	94,11	98,66	98,07	97,96	1,31	1,73	86,53	97,38
29	Bali	86,91	79,41	96,84	98,36	98,67	99,72	0,73	1,63	97,33	88,36
30	Nusa Tenggara Barat	95,64	81,73	96,47	96,35	99,55	98,94	0,75	1,08	97,66	93,41
31	Nusa Tenggara Timur	96,93	86,26	92,83	99,31	97,02	97,24	1,26	5,88	84,50	91,21
32	Papua	68,03	52,98	93,78	94,94	96,16	98,62	1,41	3,11	96,59	84,82
33	Papua Barat	76,94	62,87	91,94	98,72	93,99	78,72	1,66	1,37	98,65	94,20
	Indonesia	89,32	71,97	96,13	97,00	99,17	96,28	0,83	1,45	92,50	85,08

Indikator 3 adalah AMHP tiap provinsi. AMHP nasional sebesar 98,64% dengan nilai terbesar atau terbaik di Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,80% dan terkecil atau terburuk di Provinsi Papua sebesar 74,17%. Perbedaan AMHP terbesar dan terkecil sangat besar, yaitu sebesar 25,63% menunjukkan disparitas yang besar antarprovinsi.

Indikator 4 adalah AL SD dan AL SMP tiap provinsi. AL SD nasional 99,17% sudah mendekati ideal, namun nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa

Barat, yaitu sebesar 99,84% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 93,99%. Perbedaan AL SD antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 5,85% menunjukkan adanya disparitas. AL SMP nasional 96,28% sudah mendekati ideal, namun nilai terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 99,78% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 78,72%. Perbedaan AL SD antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 21,06% menunjukkan disparitas yang besar.

Tabel 4 (lanjutan) Indikator Pendidikan yang Dihasilkan dari MDGs Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	APK SD			APK SMP			Indeks Paritas Gender (IPG)		Angka Melek Huruf Pemuda (AMHP)			IPG
		Laki2	Perempuan	Rata2	Laki2	Perempuan	Rata2	APK SD	APK SMP	Laki2	Perempuan	Rata2	
1	DKI Jakarta	103,25	103,85	103,54	97,69	93,54	95,59	1,01	0,96	99,79	99,81	99,80	1,00
2	Jawa Barat	103,44	104,55	103,98	84,53	87,87	86,16	1,01	1,04	99,49	99,59	99,54	1,00
3	Banten	107,05	108,60	107,80	81,72	83,97	82,81	1,01	1,03	99,37	99,42	99,39	1,00
4	Jawa Tengah	109,83	108,23	109,05	87,57	89,94	88,72	0,99	1,03	99,22	99,46	99,34	1,00
5	DI Yogyakarta	105,12	104,10	104,62	93,59	94,48	94,02	0,99	1,01	99,49	99,65	99,57	1,00
6	Jawa Timur	105,27	102,51	103,92	83,10	83,82	83,45	0,97	1,01	99,16	99,19	99,17	1,00
7	Aceh	117,83	117,19	117,52	98,35	101,30	99,79	0,99	1,03	99,03	99,21	99,12	1,00
8	Sumatera Utara	110,24	110,30	110,27	94,69	96,50	95,58	1,00	1,02	98,77	98,37	98,57	1,00
9	Sumatera Barat	114,78	112,19	113,53	86,59	95,70	91,04	0,98	1,11	98,58	99,02	98,80	1,00
10	Riau	106,35	105,20	105,80	84,29	88,13	86,16	0,99	1,05	99,16	99,18	99,17	1,00
11	Kepulauan Riau	100,50	103,11	101,77	91,69	97,78	94,64	1,03	1,07	99,11	99,31	99,22	1,00
12	Jambi	116,87	117,37	117,11	90,02	94,32	92,12	1,00	1,05	98,92	98,93	98,93	1,00
13	Sumatera Selatan	113,59	115,67	114,60	87,03	88,45	87,73	1,02	1,02	98,83	99,15	98,99	1,00
14	Bangka Belitung	107,87	108,92	108,38	79,81	87,50	83,54	1,01	1,10	98,88	97,99	98,45	0,99
15	Bengkulu	119,46	120,84	120,13	93,61	95,83	94,69	1,01	1,02	98,81	99,09	98,95	1,00
16	Lampung	119,61	119,48	119,54	87,19	91,26	89,17	1,00	1,05	99,24	99,44	99,34	1,00
17	Kalimantan Barat	119,36	119,21	119,29	85,40	86,40	85,89	1,00	1,01	97,82	97,72	97,77	1,00
18	Kalimantan Tengah	118,54	120,10	119,30	87,69	90,57	89,10	1,01	1,03	99,02	99,14	99,08	1,00
19	Kalimantan Selatan	107,26	106,34	106,82	73,52	75,15	74,31	0,99	1,02	99,04	99,16	99,10	1,00
20	Kalimantan Timur	107,83	107,44	107,64	92,33	95,46	93,84	1,00	1,03	99,19	99,28	99,23	1,00
21	Sulawesi Utara	110,53	111,51	111,00	93,92	99,67	96,72	1,01	1,06	99,10	99,49	99,29	1,00
22	Gorontalo	117,94	120,63	119,25	84,24	87,89	86,02	1,02	1,04	96,01	98,13	97,08	1,02
23	Sulawesi Tengah	106,19	107,10	106,63	96,39	100,00	98,15	1,01	1,04	97,33	97,81	97,57	1,00
24	Sulawesi Selatan	105,09	105,58	105,33	94,14	96,76	95,42	1,00	1,03	96,43	97,74	97,09	1,01
25	Sulawesi Barat	111,18	114,97	113,01	93,33	96,34	94,79	1,03	1,03	99,01	99,23	99,12	1,00
26	Sulawesi Tenggara	115,67	117,62	116,61	98,62	102,16	100,33	1,02	1,04	97,44	98,12	97,78	1,01
27	Maluku	123,82	127,69	125,68	107,47	112,24	109,78	1,03	1,04	98,61	98,48	98,55	1,00
28	Maluku Utara	114,86	128,48	121,43	111,48	112,75	112,10	1,12	1,01	98,49	98,49	98,49	1,00
29	Bali	105,21	105,32	105,26	96,27	98,55	97,37	1,00	1,02	98,79	98,52	98,65	1,00
30	Nusa Tenggara Barat	113,47	113,33	113,40	99,47	100,78	100,11	1,00	1,01	97,15	96,81	96,97	1,00
31	Nusa Tenggara Timur	118,28	118,60	118,43	90,34	92,91	91,60	1,00	1,03	94,84	96,20	95,52	1,01
32	Papua	83,86	82,24	83,11	62,54	66,11	64,19	0,98	1,06	77,05	71,08	74,17	0,92
33	Papua Barat	87,41	101,99	94,04	68,27	81,92	74,31	1,17	1,20	96,64	94,60	95,66	0,98
	Indonesia	108,38	108,37	108,37	87,64	90,16	88,87	1,00	1,03	98,60	98,68	98,64	1,00

Indikator 5 adalah APS SD dan APS SMP tiap provinsi. APS SD nasional sebesar 0,83% dengan nilai terbaik terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,46% dan terburuk terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,66%. Perbedaan APS SD antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 1,21% menunjukkan adanya disparitas. APS SMP nasional

sebesar 1,45% dengan nilai terbaik terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 0,20% dan terburuk terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,88%. Perbedaan APS SMP antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 5,67% menunjukkan disparitas yang besar.

Tabel 5. Indikator MDGs Berdasarkan 8 Indikator Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	Indikator 1		Indikator 2		Ind 3	Indikator 4	
		APM SD	APM SMP	AB5	AB SMP		AMHP	AL SD
1	DKI Jakarta	87,10	69,71	97,02	97,15	99,80	98,85	98,68
2	Jawa Barat	85,32	72,49	97,04	98,69	99,54	99,84	95,69
3	Banten	90,68	66,02	96,25	96,22	99,39	98,58	98,02
4	Jawa Tengah	91,36	68,65	96,48	96,93	99,34	99,51	93,31
5	DI Yogyakarta	87,99	71,79	97,09	95,51	99,57	97,30	94,34
6	Jawa Timur	87,11	67,38	96,56	97,75	99,17	99,60	95,35
7	Aceh	93,61	77,86	96,59	94,51	99,12	99,44	96,07
8	Sumatera Utara	92,05	74,56	96,58	95,06	98,57	99,29	97,76
9	Sumatera Barat	93,83	67,79	95,62	90,75	98,80	99,52	92,42
10	Riau	87,39	72,58	96,40	99,14	99,17	98,69	96,59
11	Kepulauan Riau	81,80	64,09	97,73	96,74	99,22	99,48	96,55
12	Jambi	91,20	74,94	95,04	96,56	98,93	99,57	98,20
13	Sumatera Selatan	94,48	73,19	95,65	98,04	98,99	99,55	99,78
14	Bangka Belitung	89,21	67,28	92,21	97,03	98,45	98,38	95,21
15	Bengkulu	94,82	76,58	95,26	97,71	98,95	98,37	97,87
16	Lampung	91,59	71,67	96,96	96,08	99,34	99,10	98,03
17	Kalimantan Barat	95,65	69,46	91,28	94,51	97,77	98,62	98,00
18	Kalimantan Tengah	91,10	72,79	95,31	94,52	99,08	99,09	95,74
19	Kalimantan Selatan	88,94	57,45	95,38	93,29	99,10	96,70	98,61
20	Kalimantan Timur	89,22	78,87	96,25	95,67	99,23	99,27	97,05
21	Sulawesi Utara	91,55	71,61	97,28	93,90	99,29	98,51	99,67
22	Gorontalo	93,04	69,10	94,22	97,22	97,08	97,62	99,34
23	Sulawesi Tengah	90,87	86,49	94,53	97,79	97,57	99,35	92,53
24	Sulawesi Selatan	87,90	82,60	94,72	99,34	97,09	99,13	98,81
25	Sulawesi Barat	94,49	84,03	93,11	98,69	99,12	96,28	99,56
26	Sulawesi Tenggara	95,76	82,34	93,76	95,33	97,78	99,26	97,38
27	Maluku	95,44	87,62	96,96	97,37	98,55	98,11	99,18
28	Maluku Utara	92,62	98,25	94,11	98,66	98,49	98,07	97,96
29	Bali	86,91	79,41	96,84	98,36	98,65	98,67	99,72
30	Nusa Tenggara Barat	95,64	81,73	96,47	96,35	96,97	99,55	98,94
31	Nusa Tenggara Timur	96,93	86,26	92,83	99,31	95,52	97,02	97,24
32	Papua	68,03	52,98	93,78	94,94	74,17	96,16	98,62
33	Papua Barat	76,94	62,87	91,94	98,72	95,66	93,99	78,72
	Indonesia	89,32	71,97	96,13	97,00	98,64	99,17	96,28

Tabel 5 (lanjutan) Indikator MDGs Berdasarkan 8 Indikator Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	Indikator 5		Indikator 6		Indikator 7		Ind 8
		APS SD	APS SMP	AM SMP	AM SM	IPG APK SD	IPG APK SMP	IPG AMH
1	DKI Jakarta	0,69	0,45	99,92	98,44	1,01	0,96	1,00
2	Jawa Barat	0,69	1,61	92,62	80,54	1,01	1,04	1,00
3	Banten	0,80	0,96	89,34	77,51	1,01	1,03	1,00
4	Jawa Tengah	0,72	0,46	95,13	75,61	0,99	1,03	1,00
5	DI Yogyakarta	0,68	0,20	109,88	105,08	0,99	1,01	1,00
6	Jawa Timur	0,68	0,79	83,99	80,65	0,97	1,01	1,00
7	Aceh	0,68	2,70	99,42	94,31	0,99	1,03	1,00
8	Sumatera Utara	0,79	1,63	98,12	92,96	1,00	1,02	1,00
9	Sumatera Barat	0,89	0,88	99,26	95,17	0,98	1,11	1,00
10	Riau	0,84	2,04	96,26	91,28	0,99	1,05	1,00
11	Kepulauan Riau	0,46	3,38	98,28	90,56	1,03	1,07	1,00
12	Jambi	1,10	2,57	93,78	89,36	1,00	1,05	1,00
13	Sumatera Selatan	0,97	1,33	94,80	84,81	1,02	1,02	1,00
14	Bangka Belitung	1,30	3,10	99,82	96,00	1,01	1,10	0,99
15	Bengkulu	1,04	1,62	90,19	89,77	1,01	1,02	1,00
16	Lampung	0,70	2,39	86,34	71,91	1,00	1,05	1,00
17	Kalimantan Barat	1,57	4,74	86,58	79,91	1,00	1,01	1,00
18	Kalimantan Tengah	0,99	1,92	87,94	85,31	1,01	1,03	1,00
19	Kalimantan Selatan	0,83	2,17	80,72	77,32	0,99	1,02	1,00
20	Kalimantan Timur	0,80	1,17	99,94	99,14	1,00	1,03	1,00
21	Sulawesi Utara	0,63	2,15	99,78	94,66	1,01	1,06	1,00
22	Gorontalo	1,02	3,36	98,42	94,91	1,02	1,04	1,02
23	Sulawesi Tengah	1,08	3,47	88,65	99,15	1,01	1,04	1,00
24	Sulawesi Selatan	1,17	0,95	94,15	99,26	1,00	1,03	1,01
25	Sulawesi Barat	1,50	0,90	96,80	94,60	1,03	1,03	1,00
26	Sulawesi Tenggara	1,37	0,61	91,25	96,32	1,02	1,04	1,01
27	Maluku	0,71	2,85	87,17	91,08	1,03	1,04	1,00
28	Maluku Utara	1,31	1,73	86,53	97,38	1,12	1,01	1,00
29	Bali	0,73	1,63	97,33	88,36	1,00	1,02	1,00
30	Nusa Tenggara Barat	0,75	1,08	97,66	93,41	1,00	1,01	1,00
31	Nusa Tenggara Timur	1,26	5,88	84,50	91,21	1,00	1,03	1,01
32	Papua	1,41	3,11	96,59	84,82	0,98	1,06	0,92
33	Papua Barat	1,66	1,37	98,65	94,20	1,17	1,20	0,98
	Indonesia	0,83	1,45	92,50	85,08	1,00	1,03	1,00

Indikator 6 adalah AM SMP dan AM SM tiap provinsi. AM SMP nasional sebesar 92,50% dengan nilai terbaik terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 109,88% dan terburuk terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 80,72%. Perbedaan AM SMP antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 29,16% menun-

jukkan disparitas yang besar. AM SM nasional sebesar 85,08% dengan nilai terbaik terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 105,08% dan terburuk terjadi di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 71,91%. Perbedaan AM SM antara nilai tertinggi dan terkecil sebesar 33,17% menunjukkan disparitas yang besar.

Tabel 6. Nilai MDGs Berdasarkan 8 Indikator Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	Indikator 1		Indikator 2		Ind 3	Indikator 4	
		APM SD	APM SMP	AB5	AB SMP	AMHP	AL SD	AL SMP
1	DKI Jakarta	0,87	0,70	0,97	0,97	1,00	0,99	0,99
2	Jawa Barat	0,85	0,72	0,97	0,99	1,00	1,00	0,96
3	Banten	0,91	0,66	0,96	0,96	0,99	0,99	0,98
4	Jawa Tengah	0,91	0,69	0,96	0,97	0,99	1,00	0,93
5	DI Yogyakarta	0,88	0,72	0,97	0,96	1,00	0,97	0,94
6	Jawa Timur	0,87	0,67	0,97	0,98	0,99	1,00	0,95
7	Aceh	0,94	0,78	0,97	0,95	0,99	0,99	0,96
8	Sumatera Utara	0,92	0,75	0,97	0,95	0,99	0,99	0,98
9	Sumatera Barat	0,94	0,68	0,96	0,91	0,99	1,00	0,92
10	Riau	0,87	0,73	0,96	0,99	0,99	0,99	0,97
11	Kepulauan Riau	0,82	0,64	0,98	0,97	0,99	0,99	0,97
12	Jambi	0,91	0,75	0,95	0,97	0,99	1,00	0,98
13	Sumatera Selatan	0,94	0,73	0,96	0,98	0,99	1,00	1,00
14	Bangka Belitung	0,89	0,67	0,92	0,97	0,98	0,98	0,95
15	Bengkulu	0,95	0,77	0,95	0,98	0,99	0,98	0,98
16	Lampung	0,92	0,72	0,97	0,96	0,99	0,99	0,98
17	Kalimantan Barat	0,96	0,69	0,91	0,95	0,98	0,99	0,98
18	Kalimantan Tengah	0,91	0,73	0,95	0,95	0,99	0,99	0,96
19	Kalimantan Selatan	0,89	0,57	0,95	0,93	0,99	0,97	0,99
20	Kalimantan Timur	0,89	0,79	0,96	0,96	0,99	0,99	0,97
21	Sulawesi Utara	0,92	0,72	0,97	0,94	0,99	0,99	1,00
22	Gorontalo	0,93	0,69	0,94	0,97	0,97	0,98	0,99
23	Sulawesi Tengah	0,91	0,86	0,95	0,98	0,98	0,99	0,93
24	Sulawesi Selatan	0,88	0,83	0,95	0,99	0,97	0,99	0,99
25	Sulawesi Barat	0,94	0,84	0,93	0,99	0,99	0,96	1,00
26	Sulawesi Tenggara	0,96	0,82	0,94	0,95	0,98	0,99	0,97
27	Maluku	0,95	0,88	0,97	0,97	0,99	0,98	0,99
28	Maluku Utara	0,93	0,98	0,94	0,99	0,98	0,98	0,98
29	Bali	0,87	0,79	0,97	0,98	0,99	0,99	1,00
30	Nusa Tenggara Barat	0,96	0,82	0,96	0,96	0,97	1,00	0,99
31	Nusa Tenggara Timur	0,97	0,86	0,93	0,99	0,96	0,97	0,97
32	Papua	0,68	0,53	0,94	0,95	0,74	0,96	0,99
33	Papua Barat	0,77	0,63	0,92	0,99	0,96	0,94	0,79
	Indonesia	0,89	0,72	0,96	0,97	0,99	0,99	0,96

Indikator 7 adalah IPG APK SD dan IPG APK SMP tiap provinsi. IPG APK SD nasional sebesar 1,00 yang ideal, namun provinsi yang ideal hanya 10 provinsi, yaitu: 1) Sulawesi Selatan, 2) Jambi, 3) Nusa Tenggara Timur, 4) Bali, 5) Sumatera Utara, 6) Lampung, 7) Nusa Tenggara Barat, 8) Kalimantan Barat, dan 9) Kalimantan Timur. IPG

APK SD terburuk di Provinsi Papua Barat sebesar 1,17. IPG APK SMP nasional sebesar 1,03 belum ideal. IPG APK SMP terburuk terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,20, sedangkan terbaik terjadi di 5 provinsi, yaitu: 1) Nusa Tenggara Barat, 2) Kalimantan Barat, 3) Maluku Utara, 4) DI Yogyakarta, dan 5) Jawa Timur.

Indikator 8 adalah IPG AMHP tiap provinsi. IPG AMHP nasional sebesar 1,00 sudah ideal dan 27 provinsi lainnya juga ideal. IPG AMHP terburuk terjadi di Papua sebesar 0,92.

Bila kedelapan indikator tersebut disatukan seperti halnya indikator EDI dengan asumsi semua indikator tersebut memiliki bobot yang sama, maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6. Untuk itu, semua indikator dijadikan nilai dalam bentuk indeks. Dengan demikian, APM SD menjadi 0,89, APM SMP menjadi 0,72, AB 5 SD menjadi 0,96, AB SMP menjadi 0,97, AMHP menjadi 0,99, AL SD menjadi 0,99, AL SMP menjadi 0,96, APS SD menjadi 0,99, APS SMP menjadi 0,93, AM SMP menjadi 0,93, AM SM menjadi 0,85, IPG APK SD menjadi 1,00, IPG APK SMP menjadi 0,97 sedangkan IPG AMH sebesar 1,00.

Berdasarkan Tabel 6 tentang nilai MDGs berdasarkan 8 (delapan) jenis indikator pendidikan, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pendidikan untuk indikator 1 sebesar 0,89 dan 0,72, indikator 2 sebesar 0,96 dan 0,97, indikator 3 sebesar 0,99, indikator 4 sebesar 0,99 dan 0,96, indikator 5 sebesar 0,99 dan 0,99, indikator 6 sebesar 0,93 dan 0,85, indikator 7 sebesar 1,00 dan 0,97 dan indikator 8 sebesar 1,00 sehingga nilai MDGs di tingkat nasional sebesar 0,944 dengan nilai tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 0,967, sedangkan nilai terkecil terjadi di Provinsi Papua, yaitu sebesar 0,886.

Bila nilai nasional dijadikan kinerja pendidikan yang baik, maka terdapat 20 provinsi dalam kondisi kinerja yang baik, sedangkan 13 provinsi lainnya berada di bawah nasional yang berarti kinerja pendidikan masih kurang. Ke-13 provinsi yang kurang adalah: 1) Sumatera Barat, 2) Bangka Belitung, 3) Jawa Barat, 4) Kalimantan Tengah, 5) Kepulauan Riau, 6) Jawa Tengah, 7) Banten, 8) Kalimantan Barat, 9) Lampung, 10) Jawa Timur, 11) Kalimantan Selatan, 12) Papua Barat, dan 13) Papua. Agar nilai MDGs meningkat, maka ke-13 provinsi yang lebih rendah dari nasional hendaknya meningkatkan semua indikator MDGs.

Rincian indikator MDGs makin jelas terlihat pada Grafik 4, di mana IPG APK SD dan IPG AMH dalam kondisi ideal sebesar 1, sedangkan AMHP, AL SD, APS SD, dan APS SMP mendekati ideal sebesar 0,99, sedangkan nilai terendah pada APM

SMP sebesar 0,72 karena makin jauh dari nilai 1. Oleh karena itu, untuk meningkatkan MDGs, maka diperlukan perbaikan pada APM SMP, kemudian AM SM dan APM SD agar nilai MDGs secara nasional akan meningkat.

Tabel 7 dan Grafik 5 menunjukkan peringkat MDGs tiap provinsi. Bila dilihat dari peringkatnya, maka peringkat pertama adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,967. Terdapat 20 provinsi yang memiliki nilai lebih baik daripada nasional dan 13 provinsi yang lebih buruk daripada nasional, yaitu: 1) Sumatera Barat, 2) Bangka Belitung, 3) Jawa Barat, 4) Kalimantan Tengah, 5) Kepulauan Riau, 6) Jawa Tengah, 7) Banten, 8) Kalimantan Barat, 9) Lampung, 10) Jawa Timur, 11) Kalimantan Selatan, 12) Papua Barat, dan 13) Papua. Agar nilai MDGs meningkat, maka ke-13 provinsi yang lebih rendah dari nasional hendaknya meningkatkan semua indikator MDGs. Contohnya, Provinsi Papua harus meningkatkan APM SD dan SMP dengan cara memasukkan penduduk usia masuk sekolah dengan usia yang sesuai, AM SM ditingkatkan agar lulusan SMP melanjutkan ke SM dengan cara memberi beasiswa.

### **Analisis Pencapaian Kinerja Pendidikan Menggunakan EDI dan MDGs**

Dengan membandingkan hasil kinerja pendidikan menggunakan indikator EDI dan MDGs, ternyata hasilnya ada yang sama dan berbeda. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 8 yang berisi tentang peringkat EDI dan MDGs tiap provinsi. Persamaan itu terlihat pada nilai Indonesia ternyata baik untuk EDI maupun MDGs termasuk dalam peringkat 21.

Perbedaan itu terlihat pada peringkat lima terbesar, peringkat 1 EDI terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan untuk MDGs terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peringkat 2 EDI pada Provinsi Maluku, sedangkan untuk MDGs dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur. Peringkat 3 EDI pada Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk MDGs dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat. Peringkat 4 EDI dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk MDGs dicapai oleh Provinsi Maluku Utara. Peringkat 5 EDI pada Provinsi Aceh, sedangkan untuk MDGs dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

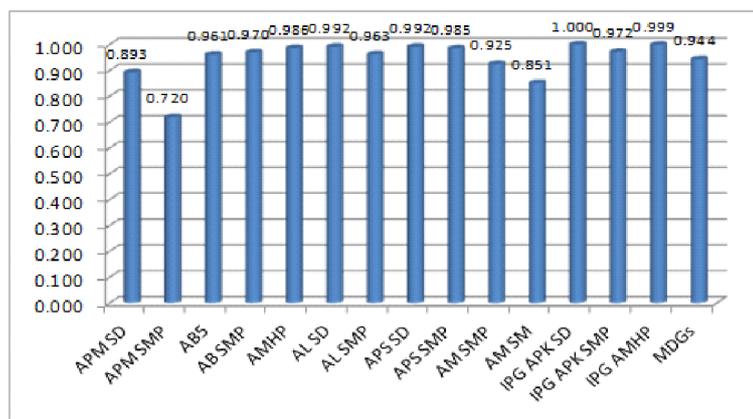
Tabel 6 (lanjutan) Nilai MDGs Berdasarkan 8 Indikator Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	Indikator 5		Indikator 6		Indikator 7		Ind 8 IPG AMHP	MDGs
		APS SD	APS SMP	AM SMP	AM SM	IPG APK SD	IPG APK SMP		
1	DKI Jakarta	0,99	1,00	1,00	0,98	0,99	0,96	1,00	0,958
2	Jawa Barat	0,99	0,98	0,93	0,81	0,99	0,96	1,00	0,939
3	Banten	0,99	0,99	0,89	0,78	0,99	0,97	1,00	0,933
4	Jawa Tengah	0,99	1,00	0,95	0,76	0,99	0,97	1,00	0,936
5	DI Yogyakarta	0,99	1,00	0,91	0,95	0,99	0,99	1,00	0,948
6	Jawa Timur	0,99	0,99	0,84	0,81	0,97	0,99	1,00	0,930
7	Aceh	0,99	0,97	0,99	0,94	0,99	0,97	1,00	0,960
8	Sumatera Utara	0,99	0,98	0,98	0,93	1,00	0,98	1,00	0,957
9	Sumatera Barat	0,99	0,99	0,99	0,95	0,98	0,90	1,00	0,942
10	Riau	0,99	0,98	0,96	0,91	0,99	0,96	1,00	0,949
11	Kepulauan Riau	1,00	0,97	0,98	0,91	0,97	0,94	1,00	0,937
12	Jambi	0,99	0,97	0,94	0,89	1,00	0,95	1,00	0,949
13	Sumatera Selatan	0,99	0,99	0,95	0,85	0,98	0,98	1,00	0,952
14	Bangka Belitung	0,99	0,97	1,00	0,96	0,99	0,91	0,99	0,942
15	Bengkulu	0,99	0,98	0,90	0,90	0,99	0,98	1,00	0,952
16	Lampung	0,99	0,98	0,86	0,72	1,00	0,96	1,00	0,931
17	Kalimantan Barat	0,98	0,95	0,87	0,80	1,00	0,99	1,00	0,931
18	Kalimantan Tengah	0,99	0,98	0,88	0,85	0,99	0,97	1,00	0,938
19	Kalimantan Selatan	0,99	0,98	0,81	0,77	0,99	0,98	1,00	0,915
20	Kalimantan Timur	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	0,97	1,00	0,964
21	Sulawesi Utara	0,99	0,98	1,00	0,95	0,99	0,94	1,00	0,955
22	Gorontalo	0,99	0,97	0,98	0,95	0,98	0,96	0,98	0,949
23	Sulawesi Tengah	0,99	0,97	0,89	0,99	0,99	0,96	1,00	0,955
24	Sulawesi Selatan	0,99	0,99	0,94	0,99	1,00	0,97	0,99	0,962
25	Sulawesi Barat	0,99	0,99	0,97	0,95	0,97	0,97	1,00	0,963
26	Sulawesi Tenggara	0,99	0,99	0,91	0,96	0,98	0,97	0,99	0,958
27	Maluku	0,99	0,97	0,87	0,91	0,97	0,96	1,00	0,957
28	Maluku Utara	0,99	0,98	0,87	0,97	0,89	0,99	1,00	0,962
29	Bali	0,99	0,98	0,97	0,88	1,00	0,98	1,00	0,957
30	Nusa Tenggara Barat	0,99	0,99	0,98	0,93	1,00	0,99	1,00	0,967
31	Nusa Tenggara Timur	0,99	0,94	0,84	0,91	1,00	0,97	0,99	0,949
32	Papua	0,99	0,97	0,97	0,85	0,98	0,95	0,92	0,886
33	Papua Barat	0,98	0,99	0,99	0,94	0,86	0,83	0,98	0,897
	Indonesia	0,99	0,99	0,93	0,85	1,00	0,97	1,00	0,944

Persamaan juga terlihat pada peringkat lima terkecil, dimana peringkat 34 EDI maupun MDGs terjadi pada Provinsi Papua. Peringkat 33 EDI maupun MDGs terjadi pada Papua Barat. Namun, untuk peringkat 30-32 terjadi perbedaan hasil. Peringkat 32 EDI terjadi pada Provinsi Sulawesi

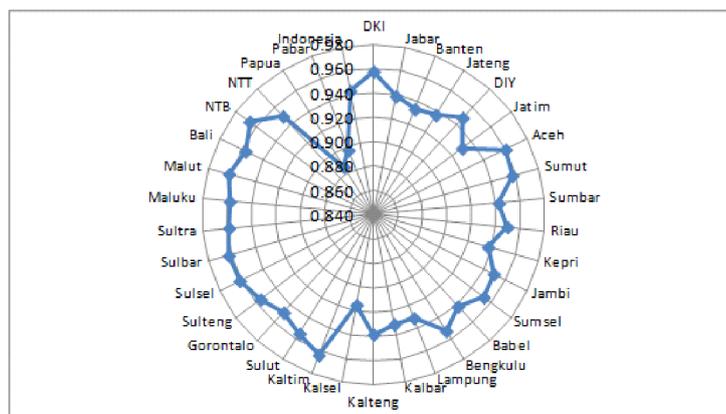
Barat, sedangkan untuk MDGs terjadi pada Provinsi Kalimantan Selatan. Peringkat 31 EDI pada Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan untuk MDGs pada Provinsi Jawa Timur. Peringkat 30 EDI diraih Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk MDGs diraih oleh Provinsi Lampung.

Grafik 4. Indikator MDGs Tahun 2011/2012



Tabel 7. Peringkat Berdasarkan Nilai MDGs Tahun 2011/2012

No.	Nama Provinsi	MDGs	No.	Nama Provinsi	MDGs
1	Nusa Tenggara Barat	0,967	18	Jambi	0,949
2	Kalimantan Timur	0,964	19	Gorontalo	0,949
3	Sulawesi Barat	0,963	20	DI Yogyakarta	0,948
4	Maluku Utara	0,962	21	Indonesia	0,944
5	Sulawesi Selatan	0,962	22	Sumatera Barat	0,942
6	Aceh	0,960	23	Bangka Belitung	0,942
7	Sulawesi Tenggara	0,958	24	Jawa Barat	0,939
8	DKI Jakarta	0,958	25	Kalimantan Tengah	0,938
9	Maluku	0,957	26	Kepulauan Riau	0,937
10	Sumatera Utara	0,957	27	Jawa Tengah	0,936
11	Bali	0,957	28	Banten	0,933
12	Sulawesi Tengah	0,955	29	Kalimantan Barat	0,931
13	Sulawesi Utara	0,955	30	Lampung	0,931
14	Sumatera Selatan	0,952	31	Jawa Timur	0,930
15	Bengkulu	0,952	32	Kalimantan Selatan	0,915
16	Nusa Tenggara Timur	0,949	33	Papua Barat	0,897
17	Riau	0,949	34	Papua	0,886



Grafik 5. Peringkat Nilai MDGs tiap Provinsi Tahun 2011/2012

Tabel 8. Peringkat EDI dan MDGs Tiap Provinsi Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	EDI	No.	Nama Provinsi	MDGs
1	Sulawesi Utara	0,976	1	Nusa Tenggara Barat	0,967
2	Maluku	0,976	2	Kalimantan Timur	0,964
3	Sumatera Selatan	0,975	3	Sulawesi Barat	0,963
4	Sumatera Utara	0,972	4	Maluku Utara	0,962
5	Aceh	0,970	5	Sulawesi Selatan	0,962
6	Bengkulu	0,970	6	Aceh	0,960
7	Lampung	0,968	7	Sulawesi Tenggara	0,958
8	DKI Jakarta	0,965	8	DKI Jakarta	0,958
9	Sumatera Barat	0,964	9	Maluku	0,957
10	Kalimantan Timur	0,963	10	Sumatera Utara	0,957
11	Banten	0,962	11	Bali	0,957
12	DI Yogyakarta	0,962	12	Sulawesi Tengah	0,955
13	Kalimantan Tengah	0,962	13	Sulawesi Utara	0,955
14	Jambi	0,960	14	Sumatera Selatan	0,952
15	Sulawesi Tenggara	0,959	15	Bengkulu	0,952
16	Jateng	0,959	16	Nusa Tenggara Timur	0,949
17	Riau	0,957	17	Riau	0,949
18	Gorontalo	0,956	18	Jambi	0,949
19	Kalimantan Selatan	0,955	19	Gorontalo	0,949
20	Maluku Utara	0,955	20	DI Yogyakarta	0,948
21	<b>Indonesia</b>	0,955	21	Indonesia	0,944
22	Sulawesi Tengah	0,954	22	Sumatera Barat	0,942
23	NTT	0,952	23	Bangka Belitung	0,942
24	Jawa Barat	0,951	24	Jawa Barat	0,939
25	NTB	0,949	25	Kalimantan Tengah	0,938
26	Kalimantan Barat	0,949	26	Kepulauan Riau	0,937
27	Bali	0,946	27	Jawa Tengah	0,936
28	Jawa Timur	0,943	28	Banten	0,933
29	Bangka Belitung	0,943	29	Kalimantan Barat	0,931
30	Sulawesi Selatan	0,940	30	Lampung	0,931
31	Kepulauan Riau	0,940	31	Jawa Timur	0,930
32	Sulawei Barat	0,940	32	Kalimantan Selatan	0,915
33	Papua Barat	0,887	33	Papua Barat	0,897
34	Papua	0,781	34	Papua	0,886

Dengan melihat peringkat yang terburuk menunjukkan provinsi yang sama, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja berdasar EDI dan MDGs terlihat tidak jauh berbeda. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan jika digunakan untuk evaluasi kinerja menggunakan salah satu hanya EDI atau hanya MDGs.

### Simpulan

Berdasarkan indikator EDI, pencapaian kinerja pendidikan sebesar 0,955 sudah bagus walaupun terjadi disparitas antarprovinsi, namun pencapaian kinerja pendidikan yang terbaik terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,976, sedangkan yang terburuk terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,781 dengan disparitas antara tertinggi dan terendah sebesar 0,195.

Berdasarkan indikator *MDGs*, pencapaian kinerja pendidikan sebesar 0,944 sudah bagus walaupun terjadi disparitas antarprovinsi, namun pencapaian kinerja pendidikan terbaik terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,967, sedangkan yang terburuk terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,886 dengan disparitas antara tertinggi dengan terendah sebesar 0,080.

Simpulan dari analisis hasil EDI dan *MDGs* adalah menggunakan kedua instrumen terdapat disparitas pencapaian kinerja pendidikan antarprovinsi. Persamaannya adalah menggunakan EDI maupun *MDGs* nilai di tingkat nasional berada pada posisi yang sama pada peringkat 21. Perbedaannya adalah hasil EDI lebih besar daripada *MDGs* karena indikator yang digunakan dalam EDI hanya 4 jenis lebih sedikit daripada *MDGs* sebanyak 8 jenis.

Dengan melihat pencapaian kinerja pendidikan pada kedua instrumen tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua instrumen tersebut dapat digunakan untuk melihat pencapaian kinerja pendidikan, karena walaupun digunakan instrumen yang berbeda namun hasil Indonesia pada peringkat yang sama dan keduanya yang terburuk adalah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

## Saran

Hasil analisis menggunakan EDI dan *MDGs* terkait dengan pencapaian pendidikan antarprovinsi menunjukkan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat, baik menggunakan instrumen EDI maupun *MDGs* menduduki peringkat terendah. Agar pada tahun mendatang kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat meningkat, oleh karenanya diperlukan pembenahan pada setiap indikator EDI maupun *MDGs*.

Berdasarkan indikator EDI, Provinsi Papua harus meningkatkan APM 7-12 tahun dengan cara memasukkan penduduk usia 7-12 tahun ke sekolah, AMH harus ditingkatkan melalui pendidikan keaksaraan, ISG perlu ditingkatkan dengan memasukkan perempuan untuk bersekolah di SD, SMP, atau pendidikan keaksaraan. AB 5 SD harus ditingkatkan dengan mengurangi siswa putus sekolah melalui program retrieval atau mengulang melalui program remedial.

Berdasarkan indikator *MDGs*, maka Provinsi Papua harus meningkatkan APM SD dan SMP dengan cara memasukkan penduduk usia masuk sekolah dengan usia yang sesuai, AM SM harus ditingkatkan agar lulusan SMP melanjutkan ke SM dengan cara memberi beasiswa.

## Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Penduduk Usia Tunggal Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design. Edisi Kedua*. California: Sage Publication.
- DJPK-Kemkeu. 2011. *Bahan paparan tentang Mekanisme Pendanaan Insentif bagi Daerah yang Mencapai Kinerja MDGs*.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Ida Kintamani. 2009. *Data dan Indikator Pendidikan*. Jakarta. Pusat Statistik Pendidikan.
- Kementerian Agama. 2011. *Statistik Madrasah Tahun 2011/2012*. Jakarta.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2012a. *Statistik Persekolahan SD Tahun 2011/2012*. Jakarta.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2012b. *Statistik Persekolahan SMP Tahun 2011/2012*. Jakarta.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2012c. *Statistik Persekolahan SM Tahun 2011/2012*. Jakarta.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2012d. *Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011/2012*. Jakarta. (tidak diterbitkan)
- UNESCO. 2009. *Overcoming inequality: Why Governance Matters*. EFA Global Monitoring Report. Paris.